

BAB IV

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini disajikan berbagai permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang relevan dengan isu-isu strategis baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu perhatian kepada kondisi masyarakat dan lingkungan, baik terkait peluang dan permasalahan yang terjadi secara internal dan eksternal merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisa terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis lingkungan eksternal yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Dengan Identifikasi atas dinamika eksternal yang tepat, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, seringkali timbul “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya gap tersebut juga dikarenakan oleh adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ini, tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai bidang. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus dikendalikan, diminimalkan dan diselesaikan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan pendidikan mencakup:

- 1) Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 7,3 Tahun
- 2) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
- 3) Belum dipenuhinya kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD

- 4) Belum tersedianya BOS, BSM, Beasiswa berprestasi, Beasiswa transisi yang didanai dari APBD Kab Tasikmalaya
- 5) Tidak meratanya pendistribusian Guru
- 6) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
- 7) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan, antara lain:

- 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
- 2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat.
- 3) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidakmenular di masyarakat
- 4) Keterbatasan akses terhadap pelayanan rujukan (RS) bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya selatan
- 5) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat sekitar 1.400 TT
- 6) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
- 7) Rendahnya cakupan PHBS di tataran Rumah Tangga dan Tempat-tempat Umum
- 8) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya
- 9) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif
- 10) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B

4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Kondisi rusak berat sepanjang 156,609 km (12 persen), kondisi rusak sedang sepanjang 293,145 km (22,5% dan kondisi rusak ringan sepanjang 195,498 km (15%)
- 2) Belum tuntasnya infrastruktur jalan Ciawi-Singaparna
- 3) Sempitnya jalan menuju kawasan pusat pemerintahan
- 4) Terbatasnya aksesibilitas/keterhubungan dengan kabupaten/kota lain
- 5) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang
- 6) Tidak memadainya kapasitas jalan menuju ibu kota Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna)
- 7) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
- 8) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun

b. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

- 1) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang
- 2) Belum meningkatnya status status hierarki struktur ruang Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi dan (PKLp) Manonjaya menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta status PPK Rajapolah dan PPK Cikatomas menjadi PKLp
- 3) Belum terselesaikannya perwujudan ruang kawasan Ibu Kota dan kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- 4) Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% (persen) dari luas wilayah kota di Kabupaten Tasikmalaya
- 5) Belum terbangunnya pasar dan terminal di jalan Ciawi Singaparna
- 6) Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang
- 7) Belum adanya PPNS penataan ruang

c. Sub Bidang Air Bersih dan Air Minum

- 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
- 2) Belum sesuai kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada
- 3) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru
- 4) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
- 5) Masih adanya wilayah rawan air bersih
- 6) Lemahnya perlindungan sumber mata air

d. Sub bidang Air Bawah Tanah

- 1) Masih besarnya potensi air bawah tanah yang belum diidentifikasi dan dimanfaatkan;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang air bawah tanah;
- 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah

e. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi

- 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan penambangan pasir Galunggung
- 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada
- 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Belum optimalnya cakupan layanan pengairan bendung Padawaras

4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Banyaknya permukiman di daerah rawan bencana
- 2) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan

- 3) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman
- 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian ketersediaan dan penyerahan PSU perumahan dan permukiman

4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan
- 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
- 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara
- 4) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
- 5) Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban makin menurun
- 6) Sosialisasi regulasi tentang ketenteraman dan ketertiban belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah
- 7) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
- 8) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
- 9) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS

4.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Penanganan PMKS masih rendah karena terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan keberpihakan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- 4) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
- 5) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
- 6) Belum adanya regulasi pemanfaatan CSR bagi PMKS dan penanggulangan kemiskinan
- 7) Lemahnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan
- 8) Makin tingginya angka penderita HIV/AIDS

4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Tingginya angka pengangguran terbuka, 6,5%
- 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.
- 3) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru
- 4) Masih rendahnya keberpihakan APBD Kab untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif di pasar kerja

4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 2) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembnagunan
- 3) Belum ada data terpilah dan terpadu berbasis gender
- 4) Terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan bagi perempuan terutama perempuan kepala keluarga (PEKKA)
- 5) Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak
- 6) Belum tersedianya sekretariat P2TP2A dan rumah singgah untuk penanganan kasus
- 7) Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Harga pangan pokok strategis yang belum stabil terutama dalam masa paceklik dan panen raya
- 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin dan Masih banyaknya penduduk yang rawan pangan Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, terdapat 31 Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal
- 5) Kurangnya keragaman pangan terlihat dari indikator Pola Pangan Harapan 61,5% dari nilai ideal 100%
- 6) Kurang maksimalnya kelembagaan ketahanan pangan karena keterbatasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi
- 7) Rendahnya cadangan pangan pemerintah daerah

4.1.10. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

- 1) Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- 2) Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
- 3) Banyak tanah pemerintah daerah dan Desa yang belum tersertifikasi
- 4) Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan

4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 dari total luas wilayah
2. Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik

kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove).

3. Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
4. Permasalahan Kawasan Pesisir dan Laut, degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi selain itu akibat ulah manusia seperti eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan penambangan pasir besi yang dilakukan di pesisir pantai telah menyebabkan perubahan tataguna lahan di kawasan pesisir dan kerusakan lahan di kawasan pesisir
5. Lemahnya fungsi pengendalian
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan
8. Belum optimalnya implementasi dokumen lingkungan hidup dalam usaha dan/atau kegiatan
9. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan
10. Rendahnya kepemilikan jamban keluarga
11. Belum seimbangny penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik /rumah tangga dengan pertumbuhan penduduk;
12. Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantiasian
13. Belum dimilikinya IPAL Komunal (system off site sanitation) dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Tasikmalaya, untuk dapat melayani wilayah pusat kota dan kawasan perkotaan;
14. TPA Cinangsi sudah over kapasitas, dan masih menggunakan sistem open dumping
15. Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
16. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
17. Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan
18. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
19. Belum terbangunnya TPA Nangkaleah
20. Belum adanya TPST di wilayah pusat kegiatan lokal (PKL Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya)
21. Belum adanya TPS di tiap kecamatan

4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Adminisrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil
- 2) Lemahnya data kependudukan
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah

- 4) Tidak terintegrasinya pengelolaan pengendalian kependudukan dengan administrasi kependudukan
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana mobilitas layanan kependudukan dan catatan sipil

4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
- 2) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
- 3) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
- 4) Lemahnya lembaga ekonomi Desa
- 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa
- 6) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
- 7) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
- 8) Belum dikembangkannya sistem informasi desa
- 9) Belum baiknya tata kelola pemerintahan desa
- 10) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa

4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Laju pertumbuhan penduduk masih harus dikendalikan
- 2) Keterbatasan ketersediaan alat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin
- 3) Lemahnya data kependudukan
- 4) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
- 5) Rendahnya usia perkawinan pertama
- 6) Tidak terintegrasinya pengelolaan pengendalian kependudukan dengan administrasi kependudukan
- 7) Lemahnya institusi KB
- 8) Terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga

4.1.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Masih banyak daerah yang belum terlayani trayek angkutan umum
- 2) Masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan pembatasan tonase muat barang
- 3) Belum terlaksananya pembangunan terminal baru tipe B
- 4) Belum optimalnya pengelolaan sub terminal;
- 5) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan;

- 6) Belum adanya trayek menuju lokasi-lokasi strategis seperti ke pusat pemerintahan;
- 7) Belum adanya perencanaan pengembangan perhubungan laut
- 8) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten.

4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel
- 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel
- 3) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan E Government

4.1.17. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Koperasi

- 1) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
- 2) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
- 3) Masih rendahnya Kualifikasi/kualitas SDM koperasi
- 4) Terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya
- 5) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
- 6) Rendahnya pemahaman tentang pentingnya penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan USP-Koperasi.

Bidang UKM

- 1) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
- 2) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
- 3) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk
- 4) Kurangnya Diversifikasi dan tingkat kreatifitas desain produk
- 5) Terbatasnya anggaran untuk pembangunan bidang UKM
- 6) Belum terbangunnya rumah kemasan

4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

- 1) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang kondusif
- 2) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu
- 3) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas.
- 4) Belum optimalnya kemitraan dengan KADIN
- 5) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
- 6) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
- 7) Rendahnya promosi investasi penanaman modal

4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Pembinaan olah raga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olah raga prestasi untuk kelompok atlet
- 2) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjarangan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
- 4) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional
- 5) Tingginya tingkat pengangguran pemuda dengan keterampilan rendah
- 6) Tidak berjalannya pelayanan kepemudaan
- 7) Ketidakjelasan pengelolaan urusan pelayanan kepemudaan dan olah raga

4.1.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
- 2) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah

4.1.21. Urusan Persandian

- 1) Belum dilaksanakannya penyeleggaraan urusan persandian
- 2) Belum dimilikinya pola persandian antar perangkat daerah

4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global
- 2) Belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah
- 3) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif
- 4) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan

4.1.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
- 3) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

4.1.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
- 2) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

4.1.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Kurangnya armada penangkapan, alat tangkap serta alat bantu penangkapan
- 2) Rendahnya produksi hasil tangkap

- 3) Belum selesainya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI)
- 4) Degradasi kualitas lingkungan pesisir yang mengakibatkan jumlah ikan di sekitar pesisir menurun drastis
- 5) Terbatasnya Kewenangan pengelolaan pesisir yang bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten akibat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Rendahnya kesadaran Nelayan akan keselamatan pada saat melaut
- 7) Kurangnya diversifikasi usaha nelayan selain penangkapan ikan.
- 8) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar
- 9) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut
- 10) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan
- 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

4.1.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
- 2) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
- 3) Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata
- 4) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

4.1.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Bidang Pertanian

- 1) Keterbatasan Kepemilikan Lahan dengan rata-rata <0,25 Ha
- 2) Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terutama untuk sawah produktif yang beririgasi teknis.
- 3) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian
- 4) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun
- 5) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier
- 6) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha
- 7) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
- 8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- 9) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
- 10) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- 11) Berkurangnya sumber daya manusia pertanian (penyuluh yang berkurang karena masa pensiun sedangkan penggantinya tidak sebanding dengan jumlah penyuluh yang berkurang)

- 12) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (*Integrated farming System*)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik
- 13) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian
- 14) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar
- 15) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan lokal
- 16) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
- 17) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik
- 18) Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah (perhitungan NTP di BPS)
- 19) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
- 20) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik

Bidang Perkebunan

- 1) Masih rendahnya tingkat produktivitas perkebunan Harga jual komoditas perkebunan yang fluktuatif karena merupakan komoditas ekspor
- 2) Rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan karena petani perkebunan rakyat sebagian besar menjual hasilnya dalam bentuk bahan mentah
- 3) Banyaknya lahan HGU yang habis izinnya tidak dimanfaatkan
- 4) Terbatasnya penggunaan bibit unggul/yang bersertifikat oleh masyarakat
- 5) Lemahnya pengendalian hama dan penyakit terpadu
- 6) Lemahnya pengawasan peredaran bibit tanaman dan mutu obat

Bidang Peternakan

- 1) Belum optimalnya manajemen pemeliharaan ternak yang dilakukan peternak sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan populasi ternak.
- 2) Kondisi rumah potong hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai
- 3) Kurangnya sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 4) Terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (Penyuluh, Medis Veteriner, dan Paramedis Veteriner);
- 5) Terbatasnya akses peternak terhadap permodalan;
- 6) Tingkat penyediaan ternak besar (sapi dan kerbau) belum bisa memenuhi kebutuhan yang disebabkan permintaan pasar semakin meningkat dan belum diimbangi dengan penambahan populasi.

- 7) Usaha ternak bersifat sambilan masih jauh dari skala ekonomi yang terlihat dari perbandingan kepemilikan ternak per peternak masih rendah;
- 8) Terbatasnya hijauan makanan ternak yang diakibatkan oleh terbatasnya lahan dan belum berjalanya teknologi pengawetan pakan ternak;
- 9) Masih rendahnya produk asal ternak yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal

4.1.28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

- 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan
- 2) Menurunnya sifat hidrologis tanah pada lahan kritis
- 3) Rendahnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan negara
- 4) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya
- 5) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah

4.1.29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Belum adanya penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi pengelola Sub-Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten
- 2) Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian investasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten sehingga pemrosesan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat memberikan kejelasan dalam aspek persyaratan, prosedur, mekanisme dan waktu
- 3) Kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan akibat penambangan tanpa izin yang tidak terkendali
- 4) Belum adanya *masterplan* ataupun *grand design* arah pengelolaan kegiatan usaha pertambangan
- 5) Pengelolaan kegiatan pertambangan masih berorientasi terhadap penjualan *raw material*, sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah
- 6) Pengangkutan hasil tambang masih menggunakan fasilitas jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional yang berdampak terhadap kerusakan jalan
- 7) Belum adanya pelabuhan/terminal khusus pertambangan
- 8) Orientasi pelaku usaha pertambangan hanya pada penambangan bahan galian saja, tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang
- 9) Masih lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*)
- 10) Pengelolaan data pertambangan belum terintegrasi secara optimal, baik data potensi pertambangan, pelaku usaha pertambangan dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan

- 11) Banyaknya lahan bekas penambangan yang belum dilakukan reklamasi
- 12) Cakupan elektrifikasi baru mencapai 71,38 %
- 13) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro dan biogas
- 14) Masih ada kampung yang belum terjangkau aliran listrik
- 15) Belum adanya data kebutuhan energi

4.1.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Belum terbentuknya lembaga kemetriologian
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem resi gudang (SRG)
- 3) Belum terbentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen
- 4) Belum terbentuknya pasar terbib ukur
- 5) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
- 6) Belum adanya pasar induk kabupaten
- 7) Kurangnya fasilitas HAKI
- 8) Masih kurangnya fasilitas pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor
- 9) Kurangnya promosi dan misi dagang ke LN dalam rangka persaingan MEA
- 10) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

4.1.31. Urusan Pemerintahan Bidang Industri

- 1) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sektor ekonomi daerah
- 2) Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging produk
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
- 4) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku
- 5) Akses teknologi terbatas

4.1.32. Urusan Penunjang

Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dengan berbasis penelitian belum optimal.
- 2) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang.
- 3) Fasilitas, sarana, dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan penelitian baik ilmu dasar maupun ilmu terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal.
- 4) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan

Bidang Kebencanaan

- 1) Belum adanya pemetaan resiko bencana
- 2) Masih sedikit desa menjadi desa tangguh bencana
- 3) Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 4) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 5) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontingensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- 6) Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana
- 7) Keterbatasan sarana dan prasarana serta personil kebakaran

Bidang Keagamaan

- 1) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat
- 2) Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat profesi
- 3) Kecenderungan menurunnya pendidikan keagamaan terutama di lingkungan keluarga
- 4) Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah diniyah

Bidang Politik

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik
- 2) Kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah
- 4) Belum optimalnya proses pendidikan politik kepada masyarakat
- 5) Keberpihakan anggaran pendidikan politik masih rendah
- 6) Proses politik makin mahal
- 7) Maraknya politik uang
- 8) Kurang berjalannya fungsi representasi lembaga perwakilan rakyat

Bidang Hukum

- 1) Belum adanya *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah
- 2) Belum ada integrasi antara kebijakan dan regulasi/regulasi kurang mendukung kebijakan
- 3) Kurang dan rendahnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum
- 4) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat
- 5) Rendahnya produk hukum daerah

Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

- 1) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- 3) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
- 4) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional
- 5) Reformasi birokrasi belum optimal
- 6) Masih rendahnya disiplin aparatur
- 7) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
- 8) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja
- 9) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
- 10) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun
- 11) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
- 2) Lemahnya data dan informasi pembangunan
- 3) Perencanaan pembangunan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi
- 4) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Bidang Keuangan Daerah

- 1) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
- 2) Masih adanya aset yang belum tersertifikasi
- 3) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan
- 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 5) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi
- 6) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak seperti disebutkan di atas, untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Selanjutnya, sesuai perintah Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka dilakukan metode FGD dan pembobotan sekaligus skoring untuk beberapa isu strategis yang dipilih, sehingga diperoleh urutan isu strategis berdasarkan penghitungan tersebut. Adapun isu strategis yang terpilih secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kerangka Keterkaitan Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya
<p>I. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghapus kemiskinan. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Kesehatan untuk semua umur. Pendidikan yang berkualitas dan merata. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 	<p>Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (<i>Common Goals</i>) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kemandirian Pangan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku Penanganan Bencana dan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> Penanggulangan kemiskinan Mutu dan tata kelola pendidikan dasar Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Perluasan tenaga kerja dan pengangguran Ketahanan Pangan Pertumbuhan dan persebaran penduduk Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Pembangunan

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya
<p>semua.</p> <p>7. Energi untuk semua.</p> <p>8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak.</p> <p>9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan.</p> <p>10. Menurunkan ketimpangan.</p> <p>11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan.</p> <p>12. Pola konsumsi dan produksi yang Berkelanjutan.</p> <p>13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya</p> <p>14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam.</p> <p>15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan.</p> <p>16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi.</p> <p>17. Kerja sama internasional yang semakin kuat.</p>	<p>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.</p> <p>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p> <p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p> <p>8. Melakukan revolusi karakter/mental bangsa.</p> <p>9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p>	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>9. Pembangunan Perdesaan</p> <p>10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata</p>	<p>Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan</p> <p>10. Penataan Ruang dan Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p> <p>11. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p> <p>12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>13. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif</p> <p>14. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>15. Pengembangan destinasi dan arus kunjungan wisatawan</p> <p>16. Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>17. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian</p> <p>18. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak</p>

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya
II. Pemberlakuan ASEAN <i>Economic Community</i> , ditandai: 1. arus bebas barang bagi negara-negara ASEAN; 2. arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi; 3. arus tenaga kerja terampil; dan 4. arus bebas modal.			